

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar
Volume 2, 2021 | Hal. 1232 - 1240

AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DI YAYASAN MEMBANGUN BERSAMA SEMESTA INDONESIA

Aida Fitria¹, Dewi Darmastuti², Ermawati³
^{1,2,3}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

¹ aida.fitria@upvj.ac.id

² dewidarmastuti@upnvj.ac.id

³ermawati@upnvj.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di Yamesta Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara informan kunci dan informan pendukung, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Yamesta Indonesia telah menerapkan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan yayasan. Akuntabilitas yayasan dibuktikan dengan melakukan pencatatan dan penyajian laporan keuangan yayasan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan kepada yayasan terutama Yamesta Indonesia untuk dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Pengelolaan Keuangan; Yayasan; Sektor Publik

Abstract

This study aims to determine how accountability in financial management in Yamesta Indonesia. This study uses qualitative research methods by conducting interviews with key informants and supporting informants, observation and documentation. The results of this study indicate that Yamesta Indonesia has implemented accountability for the financial management of the foundation. Foundation accountability is proven by recording and presenting the foundation's financial statements as a form of accountability in managing finances. The results of this study can be used as input for foundations, especially Yamesta Indonesia, to increase accountability in financial management.

Keywords: *Accountability; Financial Management; Foundation; Public Sector*

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar
Volume 2, 2021 | Hal. 1232 - 1240

PENDAHULUAN

United Nation Development Programme (UNDP) pada Tahun 1997 menerangkan prinsi-prinsip yang perlu ditegakkan agar dapat melakukan tata pemerintahan yang baik di antaranya yaitu transparansi dan akuntabilitas. Menurut Ulfah (2018), transparansi adalah keterbukaan suatu organisasi untuk menyajikan informasi bersifat material dan relevan sehingga memudahkan untuk dipahami dan diakses bagi para *stakeholders*. Akuntabilitas merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban organisasi ataupun penerima amanah atas pengelolaan asal usul sumber daya yang telah diberikan serta diamanatkan dari pemberi amanah (Endahwati, 2014). Terwujudnya akuntabilitas adalah tujuan utama dari sebuah reformasi sektor publik.

Yayasan merupakan salah satu jenis organisasi sektor publik. Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2001, yayasan adalah badan hukum yang berisi atas harta yang telah dipisahkan serta diperuntukan untuk mewujudkan tujuan tertentu pada bidang sosial, kemanusiaan, serta keagamaan, yang tidak memiliki anggota. Dalam melaksanakan proses aktivitas operasional, yayasan mempunyai sumber pendanaan yang wajib dikelola sebaik mungkin. Yayasan Membangun Bersama Semesta Indonesia (Yamesta Indonesia) adalah bagian dari organisasi yang berjalan di bidang sosial, dimana lembaga ini adalah lembaga yang bersifat nonlaba (Priharto, 2020). Sumber dana yang ada difokuskan untuk memberdayakan anak-anak yatim dan dhuafa yang membutuhkan. Melalui pengelolaan dana dan pertanggungjawaban dengan pelaporan keuangan yang tepat serta sesuai standar, diharapkan tujuan sosial yang sejak awal telah ditetapkan oleh yayasan dapat tercapai.

Namun, kenyataannya masih ada saja yayasan yang memanfaatkan sumber dana untuk kepentingan pihak tertentu sehingga kepentingan yayasan malah terabaikan. Oleh sebab itu, untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana dari pihak yayasan terhadap bukti pengelolaan sumber dana yang diberikan maka dibuatlah laporan keuangan.

Berdasarkan hasil penemuan di lapangan, bahwa (Yamesta Indonesia) masih belum optimal dalam mempraktikkan aturan dari pengelolaan keuangan. Masalah yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan Yamesta Indonesia adalah pengelola yayasan belum mengetahui gambaran dari pengalokasian dana karena tidak adanya gambaran sejak awal uang tersebut untuk apa. Maka dari itu peneliti menilai perlu melakukan pengamatan untuk mengetahui akuntabilitas dari pengelolaan dana dalam sebuah yayasan.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2002, hlm. 20) akuntabilitas adalah kewajiban berdasarkan pemegang amanat untuk memberikan tanggungjawab atas segala kegiatan dan aktivitas sebagai tanggungjawab pada pemberi amanat yang memiliki hak dan wewenang dalam meminta pertanggungjawaban. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari pihak dalam untuk pihak luar saat mengendalikan organisasi dimana laporannya harus dipertanggungjawabkan pada rakyat dan pada *stakeholders*.

Terdapat dua jenis pertanggungjawaban menurut Mardiasmo (2002, hlm. 21) yaitu pertanggungjawaban keatas (*vertical*) dan pertanggungjawaban kebawah (*horizontal*). Pertanggungjawaban keatas adalah akuntabilitas terhadap penanganan biaya pada otoritas yang lebih tinggi, seperti akuntabilitas pada pemegang saham. Sementara pertanggungjawaban kebawah adalah akuntabilitas yang dilakukan untuk masyarakat luas.

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 1232 - 1240

Yayasan

Yayasan adalah organisasi nonlaba yang dibangun bukan bertujuan untuk mencari keuntungan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan merupakan badan hukum yang dipisahkan kekayaannya dengan tujuan untuk meraih tujuan tertentu dalam bidang sosial, agama serta kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yayasan diolah oleh perangkat Yayasan yaitu pembina, pengawas, dan juga pengurus. Menurut Bastian (2007, hlm. 4) pola pertanggungjawaban dari yayasan memiliki sifat vertikal serta horizontal. Pertanggungjawaban vertikal merupakan pertanggungjawaban yang dilakukan pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, sebagai contoh yaitu pertanggungjawaban yayasan pada pembina. Kemudian Pertanggungjawaban horisontal merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Kedua jenis pertanggungjawaban tersebut adalah bagian penting dari proses akuntabilitas.

Pengelolaan Keuangan Yayasan

Pengelolaan keuangan yang baik terlihat pada laporan keuangan yang disajikan oleh Yayasan. UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan menjelaskan bawah pengurusan kekayaan dan pelaksanaan aktivitas dijalankan seutuhnya oleh Pengurus. Maka sebab itu, Pengurus harus membuat *annual report* yang diberitahukan pada Pembina terkait kondisi keuangan serta pertumbuhan aktivitas yayasan. Selain itu dalam melakukan pengelolaan dana Yayasan menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Tentang Yayasan. Dalam hal ini dinyatakan bahwa Yayasan harus menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan UU No. 16 Tahun 2001 jo UU No. 28 Tahun 2004 agar memperoleh status badan hukum.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi digunakan karena permasalahan yang akan dikaji mengenai permasalahan yang sedang berkembang dalam kehidupan khususnya Yamesta Indonesia. Pada penelitian ini juga mengutamakan pengalaman dari seseorang yang bersifat subjektif atau dengan kata lain peneliti mencoba menggambarkan pandangan yang bersifat *emics* yaitu perspektif informan dan perspektif donatur (Poerwandari, 2007). Dengan pendekatan ini, diharapkan deskripsi dari fenomena yang tampak di lapangan bisa diinterpretasikan makna serta isinya.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memakai sejumlah teknik pengumpulan data seperti wawancara yang dilakukan memakai teknik wawancara semi terstruktur (*semistructure interview*). Peneliti berupaya mengambil peran dari pihak yang diteliti yaitu *Finanial Departement* pertanyaan yang diajukan bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan informasi. Setelah wawancara peneliti juga melakukan observasi. Observasi dilakukan melalui pengamatan dan juga pencatatan secara langsung di situs penelitian yaitu Yayasan Membangun Bersama Semesta Indonesia. Pada penelitian ini observasi dilakukan pada saat pengurus yayasan mempertanggungjawabkan keuangan yang telah diterima. Selain itu peneliti juga melakukan dokumentasi seperti foto, video atau catatan saat obervasi yang didapat secara langsung ataupun tidak langsung yang dipakai untuk memenuhi data lainnya. Peneliti juga menggunakan dokumentasi berupa laporan keuangan yayasan dan bukti lainnya yang

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 1232 - 1240

didapatkan pada saat proses penelitian. Setelah melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi, langkah selanjutnya melakukan validasi data dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat mempersatukan beberapa teknik pengumpulan data serta sumber data yang sudah ada (Sugiyono, 2013, hlm. 241). Menurut Sugiyono (2013, hlm. 273) terdapat tiga jenis triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Akuntabilitas di Yamesta Indonesia

Akuntabilitas merupakan salah satu cara pertanggungjawaban organisasi ataupun penerima amanah atas pengelolaan asal usul sumber daya yang telah diberikan serta diamanatkan dari pemberi amanah. Akuntabilitas sangat erat kaitannya dengan organisasi nonlaba agar dapat menarik kepercayaan masyarakat, hasil tersebut sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil penelitian, Indikator minimum akuntabilitas akan dijabarkan sesuai dengan hasil yang menganut pada indikator minimum menurut Solihin (2007) adalah sebagai berikut:

- (1) Terdapat kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan;

Yamesta Indonesia setiap bulannya melakukan evaluasi bersama seluruh pengurus di setiap divisi untuk membahas suatu perencanaan atau prosedur pelaksanaan kebijakan dan program Yamesta. Seperti pada saat penelitian, peneliti melihat beberapa pengurus sedang melakukan rapat dan disampaikan kepada donatur melalui pesan *Whatsapp*. Berikut pernyataan Ketua Yamesta Indonesia:

”...untuk TPQ (Taman Pendidikan Qur’an) seperti itu jika dilihat secara kasat mata itu sudah, semua sudah berjalan atau dalam kata lain sudah sesuai dalam pelaksanaannya, memang jika kita lihat lebih dalam lagi terkadang masih ada yang kurang, seperti anak-anaknya itu yang datang sedikit, ya mungkin mereka memiliki kendala yang kita tidak ketahui, tetapi dari Yamesta sendiri sudah berusaha untuk melakukan sesuai dengan prosedurnya” (Manuskrip: IK.1 9 Juni 2021)

Jawaban tersebut juga sependapat dengan Donatur Yamesta Indonesia yang menerangkan:

“...mengenai program pendidikan seperti TPQ (Taman Pendidikan Qur’an) itu kalau menurut saya sudah terlaksana, terkadang Bu Nur juga memberitahu saya melalui WA tentang apa saja yang ingin dilakukan, misalnya yamesta mau ada program apa? Kemudian bagaimana perencanannya? itu diinfokan melalui WA dan saya lihat juga sudah tercapai, berjalan dengan lancar. Pokoknya menurut saya itu semua sudah dipertanggungjawabkan dengan baik ” (Manuskrip: IP 12 Juni 2021)

- (2) Terdapat sanksi yang telah ditentukan dari kesalahan ataupun kelalaian terkait dengan hal pelaksanaan aktivitas;

Yayasan Membangun Bersama Semesta Indonesia dalam kepengurusannya masih memiliki kekurangan namun mereka tetap memiliki pengawas untuk

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 1232 - 1240

mengontrol semua kegiatan yang ada dengan tujuan bukan untuk mencari kesalahan serta memberikan hukuman tetapi untuk mendorong pertanggungjawaban kepada otoritasnya dan hingga saat ini praktik akuntabilitas di Yamesta Indonesia tidak pernah elakukan kelalaian yang fatal. Sesuai dengan pernyataan dari Ketua Umum yang menerangkan;

“Alhamdulillah, dari awal sampai sekarang saya rasa sudah kita maksimalkan, selama ini yang saya rasakan kita sudah melaksanakan sesuai dengan undang-undangnya” (Manuskrip: IK.1 9 Juni 2021)

“...Alhamdulillah belum dan mudah-mudahan jangan sampai mendapat sanksi.” (Manuskrip: IK.1 9 Juni 2021)

Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh Bendahara Yamesta Indonesia:

“Insya allah sudah, untuk sanksi Alhamdulillah tidak pernah, jangan sampai” (Manuskrip: IK.2 7 Juni 2021)

“Iya jangan sampai ya, karena kita sudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan” (Manuskrip: IK.2 7 Juni 2021)

(3) Terdapat *output* atau *outcome* yang telah terukur.

Dana yang diterima oleh Yamesya Indonesia akan digunakan untuk berbagai program, maka dari itu Yemesta Indonesia memiliki akuntabilitas program. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ketua Umum Yamesta Indonesia:

“...secara jangka pendek bentuknya lebih kepada bantuan sosial dan kemanusiaan, sosialnya dalam bentuk bantuan sandang dan pangan seperti ada yang langsung berupa santunan atau dalam bentuk sembako, selain itu ada alat tulis untuk kebutuhan anak-anak. Untuk *outcome*-nya kita memiliki kegiatan yang kontinyu baik kegiatan keagamaan pendidikan dan kegiatan-kegiatan lainnya, kebetulan kita sedang membuat rumah tahfiz dimana hal tersebut menjadi jangka panjangnya, menjadi pondasi untuk kita memiliki lembaga pendidikan” (Manuskrip: IK.1 9 Juni 2021)

Pernyataan tersebut sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti, dimana para anak-anak yatim dan dhuafa tersebut menerima bantuan berupa sembako dan juga uang tunai.

Dan sejalan dengan pernyataan Bendahara Yamesta Indonesia:

“...untuk *output* dari sumbangan yang diberikan yang terlihat itu dari Waqaf, artinya kita punya pendidikan seperti TPQ dari hal tersebut kita bisa mencerdaskan anak, jadi *output*-nya itu untuk pendidikan. Selain itu ada bantuan langsung berupa santunan uang tunai dan sembako.” (Manuskrip: IK.2 7 Juni 2021).

Sedangkan menurut Sumarwan (2019), akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan (1) Untuk apa melakukan pertanggungjawaban?; (2)

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 1232 - 1240

Bagaimana penerapan dari pertanggungjawaban kepada masyarakat ataupun donatur?; (3) Mengapa organisasi melakukan pertanggungjawaban? Berdasarkan hasil penelitian Yamesta Indonesia merasa bahwa itu adalah sebuah kewajiban dimana Yamesta Indonesia harus mempertanggungjawabkan apa yang perlu diertanggungjawabkan serta dilaporkan kepada donatur dan semua yang didapat adalah amanah yang perlu dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada manusia tetapi juga terhadap Allah SWT.

Pengelolaan Keuangan di Yamesta Indonesia

Berdasarkan draf eksposur ISAK No.35 karakteristik organisasi nonlaba berbeda dengan entitas bisnis. Organisasi nonlaba mendapatkan dana dari para penyumbang atau donatur yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ketua Umum Yamesta Indonesia:

“sumber dana yayasan itu, dominannya dari tiga unsur yang pertama itu dari civitas yayasan, terus dari usaha yayasan yang tidak mengikat, kemudian dari donatur yayasan” (Manuskrip: IK.1 9 Juni 2021).

Setiap minggunya seluruh pengurus divisi mengajukan sebuah perencanaan kegiatan dari dana yang sudah diterima. Selain itu rapat pekanan dilakukan untuk mengevaluasi, membahasa sebuah perencanaan kedepannya dari setiap divisi yang ada. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ketua Umum Yamesta Indonesia:

“perencanaan anggaran yang kita lakukan biasanya melalui pengajuan program dan kebutuhan RABnya atau Rancangan Anggaran Belanja, pembahasan tersebut dari program tahunan di kembangkan dengan program bulanan, setiap bulannya itu ada program maka dari situlah ada RAB yang diajukan” (Manuskrip: IK.1 9 Juni 2021)

“...diajukan dari setiap divisi, ada divisi sosial yang menangani anak yatim, ada divisi pendidikan yang menangani pendidikan dan kegiatan-kegiatan yang berbasis pendidikan, ada divisi SDM yang menangani sumber daya manusianya untuk peningkatan dayanya kepada setiap civitas, dan ada pembangunan itu biasanya terhadap Waqaf” (Manuskrip: IK.1 9 Juni 2021).

Pernyataan senada disampaikan oleh Bendahara Yamesta Indonesia

“...proses perencanaan anggaran yang dilakukan oleh yayasan, pertama kita ada rapat pekanan, dari rapat pekanan diusulkan kebutuhan apa saja yang diperlukan, kemudian dari sana diajukan kepada Bendahara, misalkan untuk TPQ apa saja nih yang dibutuhkan? Nah hal tersebut dari rapat pekanan” (Manuskrip: IK.2 7 Juni 2021)

“untuk perencanaanya ketua yang mengajukan kepada bendahara, ketua juga dari hasil rapat, semua civitas punya perencanaan dari semua itu kita jalanin” (Manuskrip: IK.2 7 Juni 2021)

Berikut adalah contoh dari rancangan anggaran kegiatan Yamesta Indonesia:

Tabel 1 Rancangan Anggaran

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 1232 - 1240

Adapun Mustahiq adalah		
386 Yatim	225 Dhuafa	
Kegiatan Sosial :		
- Buka puasa bareng yatim & dhuafa	30 hari x @25000 x 661	= Rp.458.250.000,-
- Sahur bareng yatim	30 hari x @20000 x 5	= Rp.3000.000,-
- Takjil on the road	20 hari x @10000 x 100	= Rp.20.000.000,-
- PPHR (Paket Pakaian Hari Raya) Yatim	386 Yatim x @650000	= Rp.250.900.000,-
	(Santunan @250000 + Paket @150000 +Pakaian @250.000) Dhuafa 225 Dhuafa x @400000 (Santunan @250000 x Paket @150000)	= Rp.90.000.000,-
Kegiatan Pendidikan :		
- Seminar Motivasi	5 kali x 1 x @Rp.1000.000	= Rp.5.000.000,-
Kegiatan Keagamaan :		
- Pesantren Kilat (Sanlat)	5 kali x 3 x @Rp.1.050.000	= Rp.15.750.000
Jumlah Anggaran		Rp. 842.900.000

Sumber : Dokumen Yamesta Indonesia

Dana yang dimiliki oleh Yamesta harus jelas pemanfaatannya untuk apa serta untuk kebutuhan apa saja agar bisa dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan yang akan dilaporkan kepada para donatur Yamesta Indonesia. Pemanfaatan dana juga harus berkaitan dengan kegiatan atau program Yamesta Indonesia, kebutuhan operasional yang nantinya akan dicatat dalam laporan keuangan Yamesta Indonesia. hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ketua Umum Yamesta Indonesia:

“...jadi bantuannya di salurkan kepada mustahik (kelompok yang berhak menerima zakat) secara langsung dan juga tunai, baik dalam bentuk uang, sembako atau dalam keperluan lainnya, kemudian ada untuk keperluan binaan atau anak yatim binaan yang masuk kedalam program beasiswa yatim” (Manuskrip: IK.1 9 Juni 2021)

“yayasan memanfaatkan dana tersebut untuk melakukan suatu kegiatan yayasan seperti yang sudah disebutkan, selain itu untuk kebutuhan operasional yayasan” (Manuskrip: IK.1 9 Juni 2021).

Pernyataan yang mendukung juga diutarakan oleh Donatur Yamesta Indonesia, sebagai berikut pernyataannya:

“...untuk kegiatan-kegiatan yayasan, seperti santunan kemudian program yayasan...”(Manuskrip: IP 12 Juni 2021)

Hal-hal yang berhubungan dengan keuangan yayasan diatur dalam UU No.16 Tahun 2001 berkaitan UU No.28 Tahun 2004 tentang yayasan. Namun pada Yamesta Indonesia laporan keuangan yang dimiliki tidak sesuai dengan peraturan yang ada dikarenakan kurangnya sumber daya manusia pada yayasan. Berikut pernyataan dari Bendahara Yamesta Indonesia :

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 1232 - 1240

“Belum dibuat” (Manuskrip: IK.2 7 Juni 2021)

“...pertama ada jurnal memorial, kemudian ada kertas kerja, laporan Aktivitas, laporan Arus Kas dan laporan neraca” (Manuskrip: IK.2 7 Juni 2021)

“untuk audit kami tidak melakukan audit laporan keuangan, paling kami memiliki pengawas saja untuk mengontrol kegiatan” (Manuskrip: IK.2 7 Juni 2021)

“...kita belum mengerti untuk audit seperti itu dikarenakan kurangnya kemampuan kita ini sebagai kaum kolonial...” (Manuskrip: IK.2 7 Juni 2021)

Pembahasan

1. Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Yamesta Indonesia adalah:

- a. Menyajikan informasi yang jelas terkait tanggung jawab
- b. Memberikan akses informasi yang mudah
- c. Penyusunan mekanisme pengaduan terkait dengan peraturan yang dilanggar
- d. Pendistribusian/penyaluran dana kepada penerima manfaat
- e. Menyediakan sarana pengaduan dan membuat peraturan di dalam yayasan.

2. Akuntabilitas dalam Penyajian Laporan Keuangan

Yamesta Indonesia merupakan organisasi nonlaba yang bergerak sebagai penerima, pengelola, penyalur dan pertanggungjawab amanah yang telah dikeluarkan oleh donatur. Sehingga transparansi dan akuntabilitas sangat diperhatikan dalam semua transaksi pengeluaran dan pemasukan. Sebagai bentuk tanggung jawab dari yayasan adalah menyajikan dan menginformasikan laporan keuangan kepada seluruh anggota Yamesta Indonesia. Pada hasil analisis dokumentasi peneliti melihat masih ada beberapa laporan yang belum dilihat dan laporan keuangan Yamesta Indonesia terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Penghasilan Komprehensif/Laporan Aktivitas serta Laporan Arus Kas.

Berikut adalah bentuk transparansi dan akuntabilitas yayasan dalam penyajian laporan keuangan kepada doantur:

- a. Rancangan Anggaran Kegiatan
- b. Laporan Neraca Keuangan yang terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar
- c. Laporan Penghasilan Komprehensif/Laporan Aktivitas Yayasan
- d. Laporan Kas Yayasan

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah tindakan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan penyajian laporan keuangan di Yamesta Indonesia sudah diterapkan dengan adanya bukti laporan keuangan yang dibuat oleh pengurus sebagai pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang membutuhkan laporan.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti masih memiliki beberapa kekurangan, yaitu adanya keterbatasan waktu pengumpulan data karena adanya pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Selain itu adanya informan yang kurang detail saat memberikan informasi dan keterbatasan pertemuan

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 1232 - 1240

dengan informan karena adanya wabah virus Covid-19 sehingga pertemuan hanya dilakukan secara daring. Oleh karena itu peneliti menyarankan bagi peneliti selanjutnya agar mempelajari secara lebih mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan penyajian laporan keuangan di yayasan agar hasil semakin baik. Peneliti juga memberikan saran untuk pengurus yayasan supaya kedepannya dapat mengembangkan kemampuan sumber daya manusia agar dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan di yayasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2007). *Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik* (Edisi 1). Erlangga.
- Endahwati, Y. D. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (Zis). *Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 4(2), 1356–1379.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. ANDI.
- Poerwandari, E. K. (2007). *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia*. LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Priharto, S. (2020). *Organisasi Nirlaba: Pengertian, Ciri-cirinya, dan Contohnya di Indonesia*. Accurate.
- Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, (2001). <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2001/16TAHUN2001UU.htm>
- Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Tentang Yayasan, (2008). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5333/pp-no-2-tahun-2013>
- Solihin, D. (2007). *Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Publik*. Slideshare.
- Sugiyono, P. D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sumarwan, A. (2019). *Examining Credit Union Accountability to Government in A Lightly Regulated Context*. National Institute of Development Administration (NIDA).
- Ulfah, I. F. (2018). Akuntabilitas Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Panti Asuhan Al Maa'uun. *Seminar Nasional Dan Call for Paper III*, 216–225.